



SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Oleh
PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Disampaikan dalam rangka
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sampang, Juni 2021



SAMPANG

Hebat Bermartabat



TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2020

REKOMENDASI

1. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja telah sesuai ketentuan

2. PENGUKURAN KINERJA

- Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan menetapkan kriteria target kinerja dan dilakukan secara berkala
- IKU sebaiknya dipersyaratkan dalam Dokumen- dokumen Perencanaan dan Penganggaran

3. PELAPORAN KINERJA

- Laporan Kinerja agar dibuat dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai, target kinerja dan realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya
- Informasi kinerja dan Laporan Kinerja harus dapat diandalkan
- Validitas informasi menjadi Acuan utama untuk memperbaiki setiap program kegiatan dalam Laporan Kinerja dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

4. EVALUASI INTERNAL

- Dokumen evaluasi internal sebaiknya dibuat untuk digunakan dalam pemantauan kemajuan kinerja
- Pemantauan Rencana Aksi harus memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

5. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja (outcome) belum maksimal dari tahun sebelumnya

TINDAK LANJUT

1. PERENCANAAN KINERJA

-

2. PENGUKURAN KINERJA

- Melakukan pengumpulan data kinerja dengan menetapkan kriteria target kinerja secara berkala
- IKU sudah dimanfaatkan dalam Dokumen- dokumen Perencanaan dan Penganggaran

3. PELAPORAN KINERJA

- Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai, target kinerja dan realisasi tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya
- Informasi kinerja dan Laporan Kinerja harus dapat diandalkan
- Menyajikan Laporan Kinerja secara kongkrit dengan informasi yang valid dan digunakan untuk peningkatan kinerja dan dan penilaian kinerja

4. EVALUASI INTERNAL

- Membuat Dokumen evaluasi internal untuk digunakan dalam pemantauan kemajuan kinerja
- Membuat Rencana Aksi yang memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Menindaklanjuti Hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk Laporan Dokumen Rencana Aksi

5. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Meningkatkan Capaian Kinerja terhadap pencapaian target kinerja pada tahun dengan tahun sebelumnya dengan didukung data yang akurat.





PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jamaluddin No.1.A Telepon (0323) 323337
SAMPANG (69213)

BERITA ACARA
**PENAJAMAN TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENSTRA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2013-2019
NOMOR 050/ 070/434.032/2018**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas, Kami:

Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

Berdasarkan Berita Acara Penajaman tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang tahun 2013-2018 Nomor 050/244/434.301/2018, maka dalam rangka penyalarsan dokumen rencana Perangkat Daerah Kami adakan penajaman tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang beserta indikatornya yang tertuang dalam dokumen Renstra sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum dan agar Berita Acara ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



a.n. BUPATI SAMPANG
SEKRETARIS DAERAH
PUTHUT BUDI SANTOSO
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610114 198603 1 008



PERJANJIAN KINERJA 2020

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2013-2018

PERJANJIAN KINERJA ESELON II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
 Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
 selanjutnya disebut pihak pertama
 Nama : H. FADHILAH BUDIONO
 Jabatan : Bupati Sampang
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
 Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
 Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
 Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 4 Januari 2018

Pihak Kedua
 BUPATI SAMPANG
 H. FADHILAH BUDIONO

Pihak Pertama
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SAMPANG
 PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
 NIP. 19610114 198603 1 008



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penerapan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai target kinerja dalam realisasi kinerja Persentase peningkatan capaian IKK Perangkat Daerah	100% 100%
2	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam peningkatan potensi ekonomi daerah	Persentase BUMD yang dinyatakan sehat	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.407.535.500,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.598.689.150,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80.946.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.100.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.205.000,00	APBD
6	Program peningkatan pelayanan kedinas kepala daerah/wakil kepala	1.875.663.000,00	APBD

7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	206.000.000,00	APBD
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	599.425.000,00	APBD
9	Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan	128.200.000,00	APBD
10	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.586.124.500,00	APBD
11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.093.945.000,00	APBD
12	Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah	89.721.200,00	APBD
13	Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam	222.707.600,00	APBD
14	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	213.750.400,00	APBD
15	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	40.509.550,00	APBD
16	Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.286.634.300,00	APBD
17	Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	772.943.350,00	APBD
18	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	3.529.734.750,00	APBD
19	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	1.297.500.000,00	APBD

Sampang, 4 Januari 2018

Pihak Kedua
 BUPATI SAMPANG
 H. FADHILAH BUDIONO

Pihak Pertama
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SAMPANG
 PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
 NIP. 19610114 198603 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. JONATHAN JUDIANTO

Jabatan : PJ. Bupati Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 29 Maret 2018

Pihak Kedua



Pihak Pertama



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya penerapan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai target kinerja dalam perjanjian kinerja Persentase peningkatan capaian IKK Perangkat Daerah	100% 100%
2	Meningkatnya pelayanan Kesekretariatan yang berorientasi terhadap kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	82
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam peningkatan potensi ekonomi daerah	Persentase BUMD yang dinyatakan sehat	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.407.535.500,00	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.598.689.150,00	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	80.946.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.100.000,00	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.205.000,00	APBD
6	Program peningkatan pelayanan kedininas kepala daerah/wakil kepala daerah	1.875.663.000,00	APBD
7	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	206.000.000,00	APBD
8	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	599.425.000,00	APBD

9	Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan	128.200.000,00	APBD
10	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.586.124.500,00	APBD
11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.093.945.000,00	APBD
12	Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah	89.721.200,00	APBD
13	Program Pembinaan Sarana Ekonomi dan Sumber Daya Alam	222.707.600,00	APBD
14	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	213.750.400,00	APBD
15	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	40.509.550,00	APBD
16	Program Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.286.634.300,00	APBD
17	Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan	772.943.350,00	APBD
18	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	3.529.734.750,00	APBD
19	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	1.297.500.000,00	APBD

Sampang, 29 Maret 2018



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

PEJABAT ESELON II

Sasaran				Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya penerapan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan	1	Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai target kinerja dalam perjanjian kinerja	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	
		2	Persentase peningkatan capaian IKK Perangkat Daerah	%	90	100	80,97	80,97	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	79,97	82	80,40	98,05	Tinggi
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam peningkatan potensi ekonomi daerah	4	Persentase BUMD yang dinyatakan sehatkat (SKM)	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi

EFEKTIFITAS ANGGARAN PER OUTCOME

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penerapan kebijakan daerah yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang Mencapai target kinerja dalam perjanjian kinerja	100	100	100	Rp.9.020.110.050,-	Rp.9.009.200.050,-	99%
	Persentase peningkatan capaian IKK Perangkat Daerah	100	80,97	80,97	Rp. 129.000.000,-	Rp. 123.643.000,-	99%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82	80,40	98,05	Rp. 11.407.535.500,-	Rp. 11.207.425.500,-	98%
Meningkatnya peran koordinasi dalam peningkatan potensi ekonomi daerah	Persentase BUMD yang dinyatakan sehatkat (SKM)	100	100	100	Rp 566.688.750,-	Rp 564.233.750,-	99%

VISI:
SAMPANG HEBAT BERMARTABAT

Misi 2

Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif

TUJUAN : Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan Perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif



SASARAN :
Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif



RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2019-2024
(konsep)



TUJUAN :
1. Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

SASARAN :
1. Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

VISI:
SAMPANG HEBAT BERMARTABAT

Misi 4

Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik

TUJUAN :
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

SASARAN :
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2019-2024

TUJUAN :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah



PROSES BISNIS

SEKRETARIAT DAERAH KAB SAMPANG



Tugas Pokok & Fungsi

PERATURAN BUPATI SAMPANG NO. 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG DAN STAF AHLI BUPATI SAMPANG

TUGAS

membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

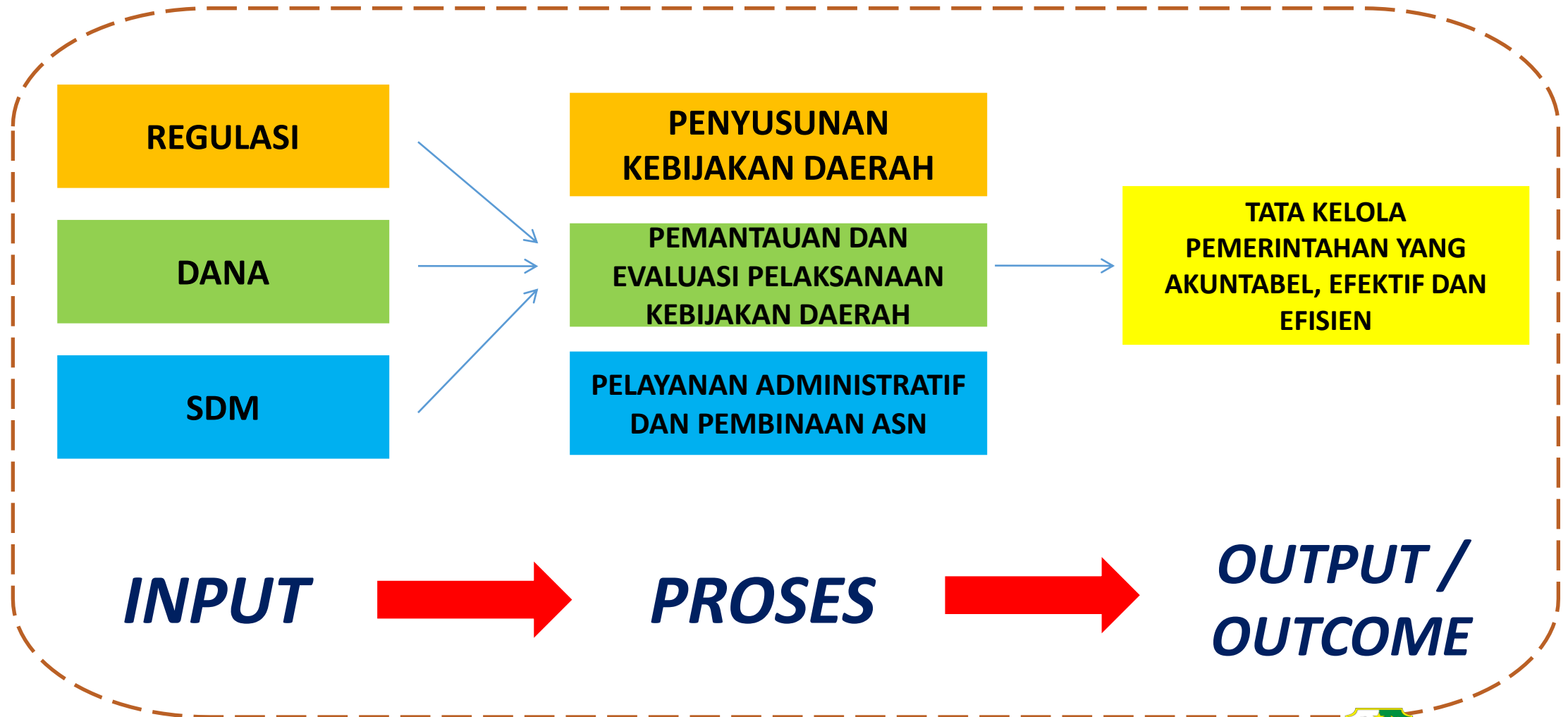


SEKRETARIAT DAERAH

FUNGSI

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH



CASCADING KINERJA

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Indeks Reformasi Brokrasi (IRB)

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP

1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai SAKIP

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target : 81,05

Nilai SAKIP
Target : 80,01/A

Tujuan RPJMD

Sasaran RPJMD

Tujuan PD

Sasaran PD

Program Peningkatan Pelayanan Publik

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target : 81,05

Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Persentase kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi Jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan
Target : 100%

Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Persentase fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Target : 100%

Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik

- Persentase Laporan Standar Pelayanan Publik yang benar dan tepat waktu
- Jumlah PD yang di Monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik

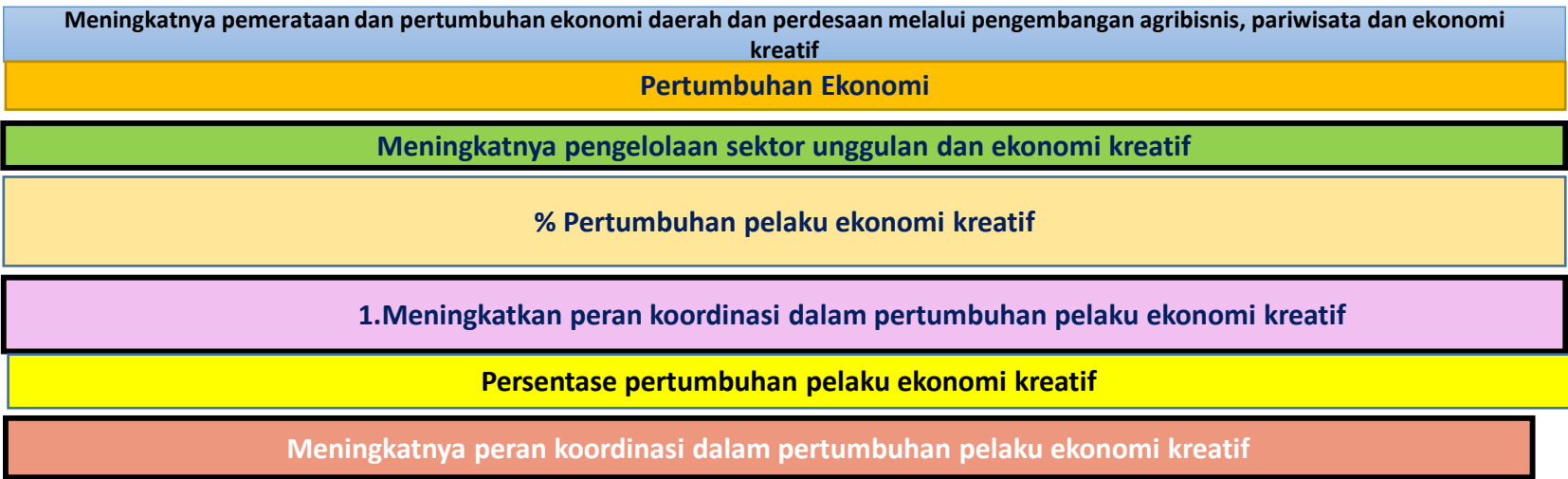
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

- Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu
- Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

- Jumlah dokumen penyusunan LPPD dan ILPPD yang disusun

CASCADING KINERJA



Persentase \hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif
Target :100%

Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah

- Persentase pelaksanaan fasilitasi peningkatan ekonomi daerah
Target : 100%
- Jumlah pelaku ekonomi kreatif
Target : 33

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Prosentase pelaksanaan sosialisasi bidang cukai di kecamatan se Kabupaten Sampang
Target : 100%

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Persentase razia cukai ilegal yang dilaporkan
Target : 100%

Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- Jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap BUMD
- * Jumlah fasilitasi dan koordinasi kegiatan BUMD

Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai

- Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi ketentuan dibidang cukai

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran

- Pembuatan dokumen/laporan cukai rokok ilegal
- Monitoring peredaran rokok ilegal

INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH



Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ADMINISTRASI UMUM

UMUM

ORGANISASI

PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN

L. 0

L. 1

L. 2

L. 3

L. 4

Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Keuangan	Rumah Tangga dan Perlengkapan	Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelayanan Publik dan TataLaksana	Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Protokol	Komunikasi Pimpinan	Dokumentasi Pimpinan
Pengelolaan administrasi perkantoran	Perencanaan keg. pengelolaan anggaran, keuangan & pertanggungjawaban anggaran	Urusan rumah tangga KADA & WAKADA serta SETDA	Penyus. Struktur Organisasi & Tata Kerja (SOTK);	Penyusu.pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja	peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah	Menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait	Pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pemantauan dan evaluasi pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas	Penyusun & pelaksanaan kebijakan	Penyediaan akomodasi, jamuan, makanan & minuman	koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi PD	Pembinaan serta bimbingan teknis di bid. ketatalaksanaan dan pelayanan publik	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten	Koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan	Pemberian masukan kepada pimpinan daerah	Penyusunan notulensi rapat KADA & WAKADA
Pengelolaan kearsipan.	Teknis pengelolaan administrasi	Penyediaan sarpras menjaga kebersihan kantor	evaluasi kelembagaan PD & unit pelaksana teknis daerah	Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik	Penyusunan road map reformasi birokrasi	Penyiapan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pemberian informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait	Fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan KADA & WAKADA
	Penatausahaan keuangan	Pengadaan perlengkapan KADA & WAKADA serta SETDA	Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Penghimpunan & memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penginformasian jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah	Penghimpunan & pengolahan informasi yang bersifat penting & mendesak	
	Pengelolaan	Pengelolaan, penggunaan, pengendalian & pemeliharaan kendaraan dinas	analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Penyiapan monitoring dan evaluasi pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyiapan dan pengendalian bahan materi rapat	
	Pembinaan dan fasilitasi	Pemeliharaan sarpras, menjaga kebersihan & pemeliharaan rumdin KADA & WAKADA serta SETDA	kajian akademik thd usulan penataan organisasi PD	Kordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik			Penggunaan bahan materi kebijakan	
	Sitem pengendalian intern	Penyiapan sarpras utk mendukung keg KADA & WAKADA serta SETDA	Penyusu. profil kelembagaan Perangkat Daerah				Penyusunan naskah sambutan dan pidato KADA & WAKADA	
	Evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawabannya							

INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

L. 0

L. 1

L. 2

L. 3

L. 4

Penyusunan Program

Perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan

Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang terkait

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Administrasi Pembangunan dan Umum

Pengendalian Program

Penyiapan rencana kegiatan

Penyiapan bahan kebijakan mempersiapkan

Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan juklak

Koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta

Sosialisasi dan koordinasi

Penyusunan program pembangunan

Koordinasi dan fasilitasi

Penyusunan rencana kegiatan pengendalian

Pengendalian sinergitas program pembangunan

Pembinaan dan fasilitasi pengendalian pelaksanaan program pembangunan

monitoring, evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dan Pelaporan

Peyusunan bahan, data & analisa pengemb. penyusunan rencana monitoring & pelaporan prog pembangunan daerah

Monitoring dan pelaporan pelaksanaan

Penyusunan pedoman, juknis dan juklak

Koordinasi dan fasilitasi

Penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program

Penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program

Penyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa

Riset dan analisis pasar barang/jasa

Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa

Penyiapan dan pengelolaan dokumen

Pemilihan penyedia barang/jasa

Penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral

Perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa

Pelayanan pengadaan

Fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna

Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi

Pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ

Pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas

Pengelolaan informasi kontrak

Pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa

pengelolaan manajemen pengetahuan

pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan

pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;

analisis beban kerja UKPBJ

pengelolaan personil UKPBJ

pengembangan sistem insentif personel UKPBJ

implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik

pengelolaan dan pengukuran kinerja

bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses

layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi

INTI PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH

Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

Peningkatan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif

L. 0

L. 1

L. 2

L. 3

L. 4

PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM

Pembinaan BUMD dan BLUD

Perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

Pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD

Analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan BLUD

Monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD

Perekonomian

Analisa pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian, dan perdagangan

Perumusan kebijakan pengembangan

Koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan

Penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan

Fasilitasi dan pembinaan

Sumber Daya Alam

Analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup

perumusan kebijakan

koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan

penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan

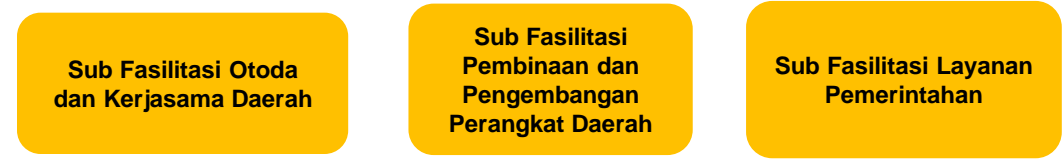
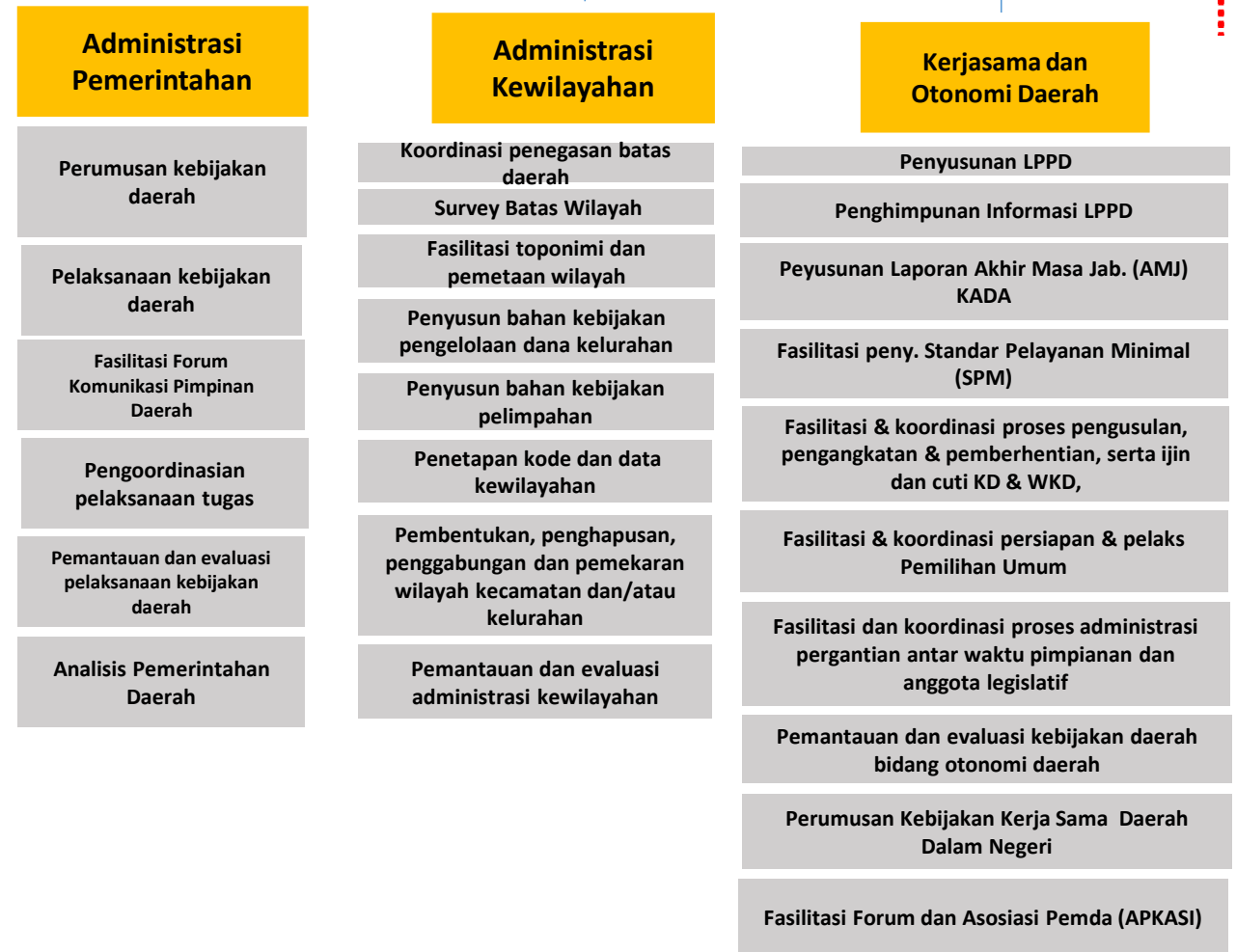
PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR PEMERINTAHAN

PEMERINTAHAN

BAGIAN FASILITASI PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH



Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah		
Sub Fasilitasi Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Sub Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Daerah	Sub Fasilitasi Layanan Pemerintahan
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah 2. Penyusunan LPPD 3. Fasilitasi Percepatan Pembakuan Rupa Bumi dan Batas Wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PATEN (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) 2. Pembinaan Administrasi Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Pimpinan OPD se Kab. Sampang; 2. Dialog/Audiensi Pimpinan Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama; 3. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara, Departemen/Non Departemen, Dalam/Luar Negeri 4. Rapat Koordinasi Unsur FORKOPIMDA

PROSES BISNIS

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

HUKUM

BAGIAN HUKUM

Perundang-undangan

- Mengikuti dan mencermati perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang menyangkut tugas Pemerintah Daerah
- Melaksanakan dan membahas bersama OPD selaku pengusul Perda, Perbup dalam penyiapan bahan evaluasi dan perumusan peraturan Per-UU-an
- Mengarahkan pelaksanaan untuk mengumpulkan bahan sasaran pertimbangan kebijakan, membuat saran usul kebijakan tentang peraturan Per-uu-an
- Mengkoordinasikan, Harmonisasi penyusunan Perda bersama Biro Hukum Pemprov. Jatim, Kemenkumham Jatim dan Instansi terkait yang lain atas usulan OPD
- Melaksanakan Koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga/Instansi lain di bidang Peraturan Daerah

Bantuan Hukum

- Menyelesaikan Persoalan Hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah
- Memberikan Bantuan Hukum di bidang perdata/Tata usaha Negara di dalam dan di luar Pengadilan sebagai Kuasa Khusus dari Pemangku Jabatan Kepala Daerah dan Kepala OPD di Kabupaten Sampang, CPNS, PNS yang tersangkut masalah hukum.
- Melaksanakan Kgiatan Penyuluhan Hukum dan Kadarkum
- Menghadiri persidangan di PTUN dan PN sesuai Jadwal

Dokumentasi dan Informasi Hukum

- Menghimpun dan mendokumentasikan Produk Hukum Daerah
- Menerbitkan buku Bulletin dan Buku Lembaran Daerah
- Mempublikasikan dan menyebarluaskan Produk Hukum Daerah melalui JDIIH
- Mengkoordinasikan dan Mengkaji penyusunan Keputusan Bupati dengan pihak OPD pengusul

Sub Bagian Produk Hukum Peraturan

Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Sub Bagian Produk Hukum Peraturan	Sub Bagian Bantuan Hukum	Sub Bagian Dokumentasi dan Keputusan Bupati
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Penyusunan Produk Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi Dokumentasi dan Keputusan Bupati

Sub Bagian Bantuan Hukum

Sub Bagian Dokumentasi dan Keputusan Bupati

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN KESRA

Bina Mental Spiritual

- Penyiapan bahan perumusan peribadatan, pendidikan agama
- Penyiapan data peribadatan, pendidikan agama
- Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait
- Penyusunan juklak peribadatan, pendidikan agama
- Penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan dibidang keagamaan
- Koordinasi dan perumusan kebijakan lembaga & kerukunan keagamaan
- Bahan pedoman pemi lembaga keagamaan & kerukunan umat beragama

Kesejahteraan Sosial

- Bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk & KB
- Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
- Menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang terkait

Kesejahteraan Masyarakat

- Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat
- Kerja sama dengan daerah penempatan transmigrasi
- Pengarahan dan pemindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi
- Seleksi dan pelatihan calon transmigran
- Pengawalan calon transmigran dari daerah asal ke transit kabupaten, provinsi dan lokasi transmigrasi
- Fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial

Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan

Sub Bagian Tenaga Kerja dan Kependudukan

Sub Bagian Sosial dan Kesehatan

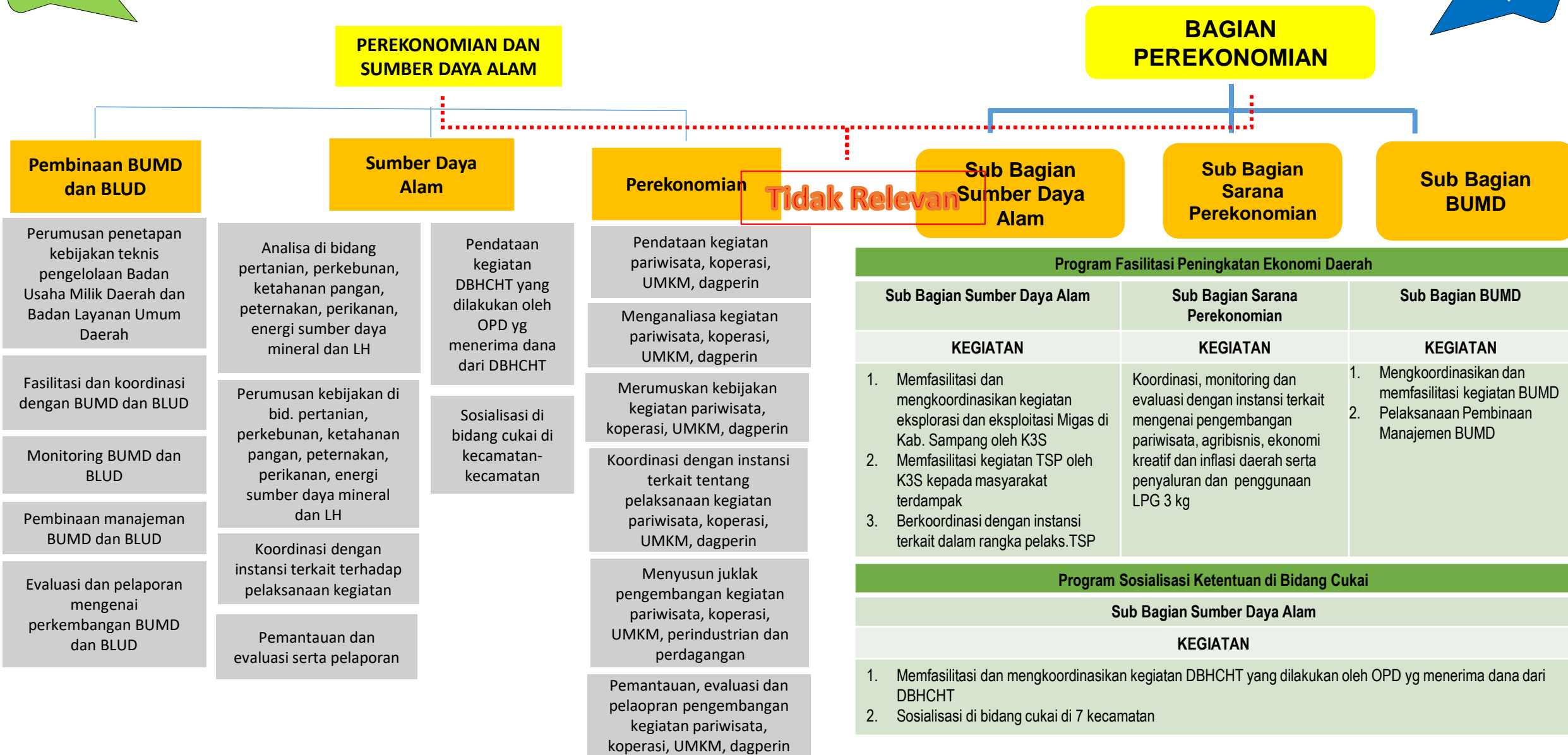
Tidak Relevan

Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	Sub Bagian Tenaga Kerja dan Kependudukan	Sub Bagian Sosial dan Kesehatan
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan 	<p>Rapat koordinasi bidang tenaga kerja dan kependudukan</p>	<p>Rapat koordinasi bidang Sosial dan Kesehatan</p>

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI



PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

BAGIAN PEREKONOMIAN

Pembinaan BUMD dan BLUD

- Perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
- Fasilitasi dan koordinasi dengan BUMD dan BLUD
- Monitoring BUMD dan BLUD
- Pembinaan manajemen BUMD dan BLUD
- Evaluasi dan pelaporan mengenai perkembangan BUMD dan BLUD

Sumber Daya Alam

- Analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan LH
- Perumusan kebijakan di bid. pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan LH
- Koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan
- Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan

Perekonomian

- Pendataan kegiatan pariwisata, koperasi, UMKM, dagperin
- Menganalisa kegiatan pariwisata, koperasi, UMKM, dagperin
- Merumuskan kebijakan kegiatan pariwisata, koperasi, UMKM, dagperin
- Koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan pariwisata, koperasi, UMKM, dagperin
- Menyusun juklak pengembangan kegiatan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kegiatan pariwisata, koperasi, UMKM, dagperin

Tidak Relevan

Sub Bagian Sumber Daya Alam

Sub Bagian Sarana Perekonomian

Sub Bagian BUMD

Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah		
Sub Bagian Sumber Daya Alam	Sub Bagian Sarana Perekonomian	Sub Bagian BUMD
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas di Kab. Sampang oleh K3S Memfasilitasi kegiatan TSP oleh K3S kepada masyarakat terdampak Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaks.TSP 	Koordinasi, monitoring dan evaluasi dengan instansi terkait mengenai pengembangan pariwisata, agribisnis, ekonomi kreatif dan inflasi daerah serta penyaluran dan penggunaan LPG 3 kg	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan BUMD Pelaksanaan Pembinaan Manajemen BUMD
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		
Sub Bagian Sumber Daya Alam		
KEGIATAN		
<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan DBHCHT yang dilakukan oleh OPD yg menerima dana dari DBHCHT Sosialisasi di bidang cukai di 7 kecamatan 		

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI

ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Penyusunan Program

- Perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang terkait
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Administrasi Pembangunan dan Umum

Pengendalian Program

- Penyiapan rencana kegiatan
- Penyiapan bahan kebijakan mempersiapkan
- Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan juklak
- Koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta
- Sosialisasi dan koordinasi
- Penyusunan program pembangunan
- Koordinasi dan fasilitasi
- Penyusunan rencana kegiatan pengendalian
- Pengendalian sinergitas program pembangunan
- Pembinaan dan fasilitasi pengendalian pelaksanaan program pembangunan
- monitoring, evaluasi dan pelaporan

Evaluasi dan Pelaporan

- Peyusunan bahan, data & analisa pengemb. penyusunan rencana monitoring & pelaporan prog pembangunan daerah
- Monitoring dan pelaporan pelaksanaan
- Penyusunan pedoman, juknis dan juklak
- Koordinasi dan fasilitasi
- Penyusunan rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program
- Penyajian data hasil evaluasi pelaksanaan program
- Penyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan

Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Pengendalian Program

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Tidak Relevan

Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah

Sub Bagian Penyusunan Program	Sub Bagian Pengendalian Program	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Monitoring dan Evaluasi dan pelaporan

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Menerima permohonan tender/ seleksi dari PPK
- Melakukan pengecekan berkas
- Ka. UKPBJ memilih Pokja Pemilihan
- Pokja Pemilihan melakukan tender/seleksi
- Dokumen hasil pemilihan penyedia
- Laporan pelaksanaan pemilihan penyedia

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- Menerima permohonan hak akses
- Melakukan pengecekan berkas
- Membuat/mengaktifasi kembali user id pemohon
- Meneruskan hasil pembuatan hak akses ke pemohon melalui email

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

- Menentukan topik bahasan & obyek pembinaan
- Berkoordinasi dg narasumber
- Melaksanakan pembinaan/pendampingan
- Membuat laporan/notulen

- pengaduan/permasalahan kontrak
- Melakukan pengkajian
- Mengundang tenaga ahli (jika diperlukan)
- Menemukan solusi/jawaban dari Pengaduan/permasalahan

Tidak Relevan

Sub Bagian Administrasi Pengadaan

Sub Bagian Pembinaan Pengadaan

Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan dan Penyelesaian Permasalahan

Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan		
Sub Administrasi Pengadaan	Sub Bagian Pembinaan Pengadaan	Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan dan Penyelesaian Permasalahan
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Pengelolaan Adiministrasi Pengadaan B/J	Pembinaan Pengadaan B/J	Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan B/J

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI

UMUM

BAGIAN UMUM

Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

- Pengelolaan administrasi perkantoran
- Pemantauan dan evaluasi pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas
- Pengelolaan kearsipan.

Keuangan

- Perencanaan keg. pengelolaan anggaran, keuangan & pertanggungjawaban anggaran
- Penyusun & pelaksanaan kebijakan
- Teknis pengelolaan administrasi
- Penatausahaan keuangan
- Pengelolaan
- Pembinaan dan fasilitasi
- Sitem pengendalian intern
- Evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban

Rumah Tangga dan Perlengkapan

- Urusan rumah tangga KADA & WAKADA serta SETDA
- Penyediaan akomodasi, jamuan, makanan & minuman
- Penyediaan sarpras menjaga kebersihan kantor
- Pengadaan perlengkapan KADA & WAKADA serta SETDA
- Pengelolaan, penggunaan, pengendalian & pemeliharaan kendaraan dinas
- Pemeliharaan sarpras, menjaga kebersihan & pemeliharaan rumdin KADA & WAKADA serta SETDA
- Penyiapan sarpras utk mendukung keg KADA & WAKADA serta SETDA

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian RumahTangga dan Perlengkapan

Tidak Relevan

Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Sub Bagian Keuangan	Sub Bagian RumahTangga dan Perlengkapan
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Sistem, Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 3. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANISASI

BAGIAN ORGANISASI

Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja oleh OPD	Sosialisasi Pelayanan Publik	Peny.Peraturan Tatalaksana terbaru	Sosialisasi Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan WBK/WBBM menuju Zona Integritas
Peta Jabatan	Pendampingan Peny. SOP	Draft Perbup Pakaian Dinas/ Kode Kearsipan/ Kode Wilayah/ Tata Naskah Dinas	Penyusunan Dokumen SAKIP dan RB serta ZI oleh OPD
Koordinasi dengan OPD	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik	Perbup Peny.Peraturan Tatalaksana terbaru	Pendampingan Penyusunan Dokumen SAKIP dan RB serta ZI
Kajian Akademis SOTK	Pengiriman Unit Kerja sbg Icon Percontohan Pelayanan Publik	Sosialisasi Perbup Peny.Peraturan Tatalaksana terbaru	Penguatan Implementasi SAKIP dan RB serta ZI
Forum Grup Discussion SOTK			Evaluasi SAKIP, RB dan ZI oleh Inspektorat Daerah
Draft Perbup SOTK dan Draft Perda Kelembagaan			Evaluasi SAKIP, RB dan ZI oleh Provinsi Jawa Timur/MENPAN
Perbup SOTK dan Perda Kelembagaan			

Tidak Relevan

Sub Bagian Kelembagaan	Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan	Sub Bagian Ketatalaksanaan
------------------------	---	----------------------------

Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		
Sub Bagian Kelembagaan	Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan	Sub Bagian Ketatalaksanaan
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) 2. Penyusunan Analisis dan Formasi Jabatan	Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintah

PERBANDINGAN PROSES BISNIS DENGAN STRUKTUR ORGANISASI

PROSES BISNIS

STRUKTUR ORGANISASI

Bag Humas

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Dokumentasi Pimpinan

Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Komunikasi Pimpinan

Juru Bicara Pimpinan Daerah

Komunikasi internal pimpinan daerah

menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat

naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Protokol

tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah

bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tidak Relevan

Sub Bagian Protokol


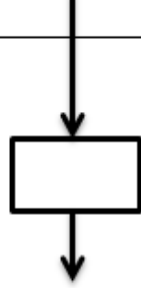
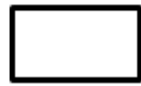
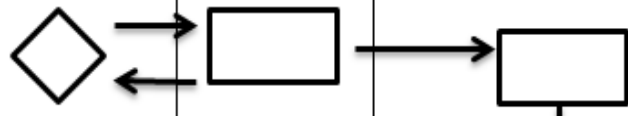
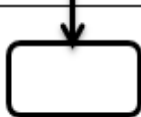
Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi

Sub Bagian Dokumentasi dan Acara

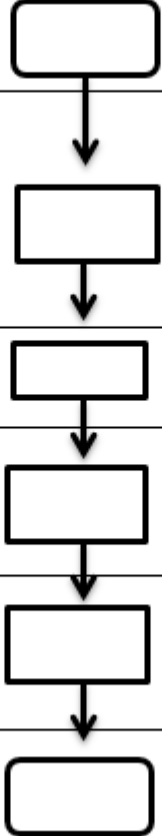
Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan

Sub Bagian Protokol	Sub Bagian Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi	Sub Bagian Dokumentasi dan Acara
KEGIATAN	KEGIATAN	KEGIATAN
Fasilitasi Kehumasan dan Keprotokolan	Fasilitasi Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi	Fasilitasi Acara dan Dokumentasi

SOP ACARA DAN DOKUMENTASI BAG HUMAS

No	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan			Ket
		Kepala Bagian	Kasubag AD	Staf Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<u>Penerimaan Surat Perintah Pembuatan Sambutan</u>				<u>Disposisi Kabag, Surat Permintaan Sambutan / Agenda Kegiatan Bupati / Wabup</u>	<u>15 menit</u>		
2.	<u>Pengumpulan bahan dan materi sambutan</u>				<u>Materi sambutan dari SKPD, Referensi atau data penunjang lain</u>	<u>60 menit</u>	<u>Data terinventarisir dan tersedianya bahan penyusunan sambutan</u>	
3.	<u>Proses penyusunan naskah sambutan</u>				<u>Komputer, data, kertas, printer</u>	<u>45 menit</u>	<u>Draft naskah sambutan</u>	
4.	<u>Proses editing dan evaluasi, revisi draft naskah sambutan</u>				<u>Draft naskah sambutan, data</u>	<u>30 menit</u>	<u>Naskah sambutan</u>	
5.	<u>Pembukuan naskah sambutan dan pengiriman</u>				<u>Naskah sambutan</u>	<u>30 menit</u>	<u>Arsip sambutan</u>	

SOP ACARA DAN DOKUMENTASI BAG HUMAS

No	Kegiatan	Mutu Baku			Keterangan			Ket
		Kepala Bagian	Kasubag AD	Staf Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<u>Pengambilan gambar foto dan video setiap kegiatan Kepala daerah / wakil kepala daerah</u>				Data <u>kamera video shooting</u>	3 jam	<u>Kegiatan</u>	
2.	<u>Menyusun album foto</u>				Folder <u>foto, album foto</u>	2 jam	<u>Hasil foto kegiatan</u>	
3.	<u>Menyusun bank data video</u>				<u>Komputer, data kegiatan</u>	3 jam	<u>Hasil video kegiatan</u>	
4.	<u>Membuat cover foto dan video</u>				<u>Komputer, data kegiatan</u>	2 jam	<u>Hasil Foto dan Video dalam CD format</u>	
5.	<u>Render gambar video</u>				<u>Komputer, data kegiatan</u>	3 jam	<u>Produk film</u>	
6.	<u>Capture Foto</u>				<u>Komputer, data kegiatan</u>	1 jam	<u>Hasil foto dan kegiatan</u>	

SOP ACARA DAN DOKUMENTASI BAG HUMAS

No	Kegiatan	Mutu Baku				Keterangan			Ket
		Kepala Bagian	Kasubag AD	Staf Humas	Pihak Ketiga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	<u>Permintaan pembuatan banner / spanduk / baliho</u>					<u>Surat</u>	<u>3 jam</u>	<u>Data foto</u>	
2.	<u>Desain banner/baliho/spanduk</u>					<u>Komputer, data foto</u>	<u>5 jam</u>	<u>Gambar desain</u>	
3.	<u>Cetak banner/spanduk/baliho</u>						<u>Tentatif</u>	<u>Banner / baliho</u>	
4.	<u>Pemasangan banner/baliho/spanduk</u>						<u>Tentatif</u>	<u>Sudah terpasang</u>	
5.	<u>Bongkar banner/baliho/spanduk</u>						<u>Tentatif</u>	<u>Sudah dilepas</u>	



STRUKTUR RENSTRA

BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG 2013-2018

CAPAIAN DAN TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN REALISASI					Kondisi Awal	TARGET						Kondisi Akhir	
			2013	2014	2015	2016	2017		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Tujuan 1 :																
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai Sakip Kabupaten Sampang	Nilai	40,10/C	48,26/C	48,29/C	50,06/C C	55,83/C C	64,23/B	80,01/A	80,01/A	80,01/A	80,01/A	80,01/A	90,01/A,A	90,01/A,A	
Sasaran 1 :	1 Nilai EKPPD	Nilai	3,21	3,1	2,94	3,2	2,93	2,83	3,1	3,21	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2 Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
	3 Persentase IKUPD yang mencapai target	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
Tujuan 2 :																
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,62	76,78	78,35	78,87	79,97	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,75	
Sasaran 2 :																
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	76,62	76,78	78,35	78,87	79,97	80,40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,75	
Tujuan 3 :																
Meningkatkan peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	1 Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	
Sasaran 3 :																
Meningkatnya peran	1 Persentase jumlah hasil	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	100	100	100	100	100	

KESESUAIAN RENJA DAN RKA 2019

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target	PROGRAM		Kegiatan	
		2019	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	80,01/A	Persentase target kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan	100%	Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	100%
					Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100%

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir			
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2019		Formulir			
Urusan Pemerintahan	: 4.05. - FUNGSI PENUNJANG LAINNYA				
Organisasi	: 4.05.03. - SEKRETARIAT DAERAH				
Program	: 4.05.4.05.03.18. - Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				
Kegiatan	: 4.05.4.05.03.18.01. - Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)				
Lokasi Kegiatan	: sekretariat daerah kabupaten sampang				
Jumlah Tahun n-1	: Rp. 241.815.000,00 (Dua ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n	: Rp. 289.964.000,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1	: Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja			
Capaian Program	Persentase kinerja kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan	100%			
Masukan	Jumlah Anggaran	Rp. 289.964.000,00			
Keluaran	- Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu - Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100%			
Sasaran	Nilai SAKIP Kabupaten	80,01/A			
Kelompok Sasaran Kegiatan :	42 Perangkat Daerah				
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
4.05.4.05.03.18.5.	BELANJA				289.964.000,00
4.05.4.05.03.18.5.2.	BELANJA LANGSUNG				289.964.000,00
4.05.4.05.03.18.5.2.1.	BELANJA LANGSUNG				289.964.000,00



PERJANJIAN KINERJA 2019

SETDA KABUPATEN SAMPANG 2019-2024

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. JONATHAN JUDIANTO

Jabatan : P.J. Bupati Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI SAMPANG

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
NIP. 19610114 198603 1 008



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EkPPD 2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah: a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum 3. Persentase IKU PD yang mencapai target	3,1 100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	Nilai SAKIP Setda	80,1/A
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,05
4	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.439.702.500	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.440.284.150	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.500.000	APBD
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	40.267.000	APBD
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.245.405.000	APBD
6	Program Fasilitas Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.389.024.000	APBD
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.059.475.000,00	APBD
8	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.250.987.000,00	APBD
9	Program Fasilitas Administrasi Pembangunan Daerah	1.071.400.000,00	APBD
10	Program Fasilitas Unit Layanan Pengadaan	766.916.800,00	APBD
11	Program Fasilitas Peningkatan Ekonomi Daerah	248.328.550,00	APBD
12	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	840.034.000,00	APBD
13	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.201.363.650	APBD
14	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	182.350.000,00	DBHCHT
15	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	40.549.550,00	DBHCHT

Sampang, 2 Januari 2019

BUPATI SAMPANG

SEKRETARIS DAERAH



PUTHUT BUDI SANTOSO, SH. M.Si
NIP. 19610114 198603 1 008

PERUBAHAN I PERJANJIAN SEKRETARIS DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Jabatan : PIt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAI DI

Jabatan : Bupati Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 1 Juli 2019

Pihak Kedua

BUPATI SAMPA NGPIT.

H. SLAMET JUNAI DI

Pihak Pertama

PIT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPA NG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
NP 19860711 198809 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPA NG

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD 2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum 3. Persentase IKU PD yang mencapai target	3.1 100% 100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	Nilai SAKIP Setda	A/80,01
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,05
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.439.702.500	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.440.284.150	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.500.000	APBD
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	40.267.000	APBD
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.245.405.000	APBD
6	Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.389.024.000	APBD
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.059.475.000,00	APBD
8	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.250.987.000,00	APBD
9	Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	1.071.400.000,00	APBD
10	Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	766.916.800,00	APBD
11	Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	248.328.550,00	APBD
12	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	840.034.000,00	APBD
13	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.201.363.650	APBD
14	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	182.350.000,00	DBHCHT
15	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	40.549.550,00	DBHCHT

Pihak Kedua

BUPATI SAMPA NGPIT.

H. SLAMET JUNAI DI

Sampang, 1 Juli 2019

Pihak Pertama

PIT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPA NG

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
NP 19860711 198809 1 001

PERUBAHAN II PERJANJIAN SEKRETARIS DAERAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM

Jabatan : PIt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SLAMET JUNAIDI

Jabatan : Bupati Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 1 Juli 2019

Pihak Kedua

BUPATI SAMPAANGPit.



H. SLAMET JUNAIDI

Pihak Pertama

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPAANG



YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
19660711 198809 1 001



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPAANG

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD 2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum 3. Persentase IKU PD yang mencapai target	3.1 100% 100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	Nilai SAKIP Setda	A/80,01
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,05
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.439.702.500	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.440.284.150	APBD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	90.500.000	APBD
4	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	40.267.000	APBD
5	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.245.405.000	APBD
6	Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.389.024.000	APBD
7	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.059.475.000,00	APBD
8	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.250.987.000,00	APBD
9	Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	1.071.400.000,00	APBD
10	Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	766.916.800,00	APBD
11	Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	248.328.550,00	APBD
12	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	840.034.000,00	APBD
13	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3.201.363.650	APBD
14	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	182.350.000,00	DBHCHT
15	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	40.549.550,00	DBHCHT

Pihak Kedua

BUPATI SAMPAANGPit.



H. SLAMET JUNAIDI

Sampang, 1 Juli 2019

Pihak Pertama

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPAANG



YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM
19660711 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA ASISTEN ADMINSTRASI UMUM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM
Jabatan : Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sampang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
NIP. 19611207 199302 1 001

Pihak Pertama
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG



SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM
NIP. 19651210 199302 1 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat serta Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan penunjang bidang keuangan dan kepegawaian	Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang administrasi umum, organisasi dan hubungan masyarakat	100%
		Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah	100%
		Persentase pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah	100%
		Persentase pelaksanaan pembinaan administrasi bidang administrasi umum, organisasi dan hubungan masyarakat	100%


Sampang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG



PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
NIP. 19611207 199302 1 001

Pihak Pertama
PLT. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG



SRI ANDOYO SUDONO, SH, MM
NIP. 19651210 199302 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ASISTEN ADMNISTRASI UMUM



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACH HAFI, SH
Jabatan : Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 15 Februari 2019



Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
NIP. 19611207 199302 1 001

Pihak Pertama
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

ACH HAFI, SH
NIP. 19630111 198603 1 010



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terwujudnya perumusan kebijakan, mengoordinasikan Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Hubungan Masyarakat serta Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan urusan penunjang bidang keuangan dan kepegawaian	Persentase pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang administrasi umum, organisasi dan hubungan masyarakat Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan pembinaan administrasi bidang administrasi umum, organisasi dan hubungan masyarakat	100% 100% 100% 100%

Sampang, 15 Februari 2019



Pihak Kedua
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
NIP. 19611207 199302 1 001

Pihak Pertama
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. SAMPANG

ACH HAFI, SH
NIP. 19630111 198603 1 010

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BAGIAN ORGANISASI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. IMAM SANUSI, M.Pd.
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua

PUHUT BUDI SANTOSO, SH.M.Si
NIP. 19610114 198803 1 008

Pihak Pertama

Drs. IMAM SANUSI, M.Pd.
NIP. 19630727 198803 1 005



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG


NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan Perundang undangan.	Persentase Kinerja Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis dan Formasi Jabatan yang sesuai dengan Kebutuhan dan Peraturan Perundang – undangan.	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rp. 1.250.187.000	APBD

Sekretaris Daerah

PUHUT BUDI SANTOSO, SH. M. Si
NIP. 19610114 198803 1 008

Sampang, 2 Januari 2019
Kepala Bagian Organisasi


Drs. IMAM SANUSI, M.Pd.
NIP. 19630727 198803 1 005

PERJANJIAN KINERJA KASUBAG ANALISIS DAN FORMASI JABATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNA EKAWATY, ST.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Analisis Formasi dan Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. IMAM SANUSI, M.Pd.

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampang, 2 Januari 2019

Pihak Kedua

Drs. IMAM SANUSI, M.Pd.
NIP. 19630727 198803 1 005

Pihak Pertama

ERNA EKAWATY, ST.
NIP.19790621 200604 2 020



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS DAN FORMASI JABATAN BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Analisis Jabatan, ABK dan SKJ yang sesuai dengan Standar	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Analisis Jabatan, ABK dan Peta Jabatan sesuai kebutuhan- Persentase Evaluasi Jabatan yang sesuai Permenpan- Persentase Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS sesuai standar yang dibutuhkan SO dan Tupoksi PD	100% 100 % 100 %
2	Tersusunnya dokumen Pelaporan Kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu- Persentase Pelaporan Kinerja Kabupaten Sampang yang berkualitas dan tepat waktu	100% 100%

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rp. 289.984.000	APBD
2	Penyusunan Analisa Jabatan	Rp. 276.235.000	APBD

Sampang, 2 Januari 2019

Kepala Bagian Organisasi

Drs. IMAM SANUSI, M.Pd.
NIP. 19630727 198803 1 005

Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan

ERNA EKAWATY, ST.
NIP. 19790621 200604 2 020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

1	INSTANSI	: Sekretariat Daerah
2	TUJUAN	: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
3	TUGAS	: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
4	FUNGSI	: 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai EKPPD	EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), maupun laporan dari masyarakat. EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EKPPD dan Tim Daerah EKPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, self assessment) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai	RPJMD	Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah

		2. Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	= (jumlah kebijakan daerah / jumlah rumusan kebijakan) x 100%		Semua Bagian
		3. Persentase IKU PD yang mencapai target	=(jumlah IKU PD yang mencapai target / jumlah seluruh IKU PD) x 100%		Bagian Organisasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang	Nilai SAKIP Setda		Semua Bagian
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsar}}{\text{Total unsur yang terdapat}} \times \text{Nilai penimbang}$		Bagian Organisasi
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif	=(realisasi koordinasi ekonomi kreatif / target koordinasi ekonomi kreatif) x 100%;		Bagian Perekonomian



RENCANA AKSI

PENCAPAIAN KINERJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2018

RENCANA AKSI Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUTPUT				PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
		TW1	TW2	TW3	TW4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EKPPD				100	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)			v	v	Bagian POD	130.000.000,00
	Nilai SAKIP Kabupaten				100	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	v	v	v	v	Bagian Organisasi	396.764.000,00
Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum		25	25	25	25	Penyusunan Produk Hukum		v	v	v	Bagian Hukum	130.000.000,00
						Koordinasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan	v	v	v	v	Bagian Administrasi dan Kesra	113.460.500,00
						Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			v	v	Bagian Administrasi Pembangunan	175.000.000,00
						Pelaksanaan dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		v	v	v	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	465.679.000,00
						Fasilitasi Pemberitaan dan Penyebarluasan Informasi	v	v	v	v	Bagian Hubungan Masyarakat	347.150.000,00
						Peningkatan Ketatalaksanaan Pemerintahan						

RENCANA AKSI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	OUTPUT				PENANGGUNGJAWAB	ANGGARAN
		TW1	TW2	TW3	TW4		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Persentase IKU PD yang mencapai target	25	25	25	25	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	v	v	v	v	Bagian Organisasi	396.764.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	30	30	40		Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Publik			v	v	Bagian Organisasi	120.391.000,00
Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif					Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Sumber Daya Alam			v	v	Bagian Perekonomian	
						Koordinasi dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	v	v	v	v		



PENGUKURAN KINERJA

TAHUN 2019 (sd Triwulan II)

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

PEJABAT ESELON II

Sasaran			Tahun 2019		% Capaian	Kategori
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi		
1 Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Nilai EKPPD		3,1	0	0	Kurang
	2 Nilai SAKIP Kabupaten		80,01/A	0	0	Kurang
	3 Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum	%	100	50	50	Kurang

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

PEJABAT ESELON II

Sasaran				Tahun 2019		% Capaian	Kategori
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi			
	4	Persentase IKU PD yang mencapai target	%	100	50	50	Kurang
3	5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81,5	0	0	Kurang
4	6	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif	%	100	46,88	46,88	Kurang

Alokasi Anggaran Per Sasaran Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EKPPD		
		Nilai SAKIP Kabupaten		
		Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum		
		Persentase IKU PD yang mencapai target		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
4	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif		
JUMLAH			7.412.038.000,00	100

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai EKPPD			
		Nilai SAKIP Kabupaten			
		Persentase rumusan yang menjadi kebijakan daerah; a. Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah b. Bidang Kesra c. Bidang Hukum d. Bidang Perekonomian e. Bidang Barjas f. Bidang Pembangunan g. Bidang Organisasi h. Bidang Humas i. Bidang Umum			
		Persentase IKU PD yang mencapai target			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
3	Meningkatnya peran koordinasi dalam pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Persentase jumlah hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait tentang ekonomi kreatif			

INOVASI

Inbox (269) - erna9791@gmail.com × (1) WhatsApp × SAKIP - Kabupaten Sampang × +

sakup.sampangkab.go.id 70% Search

HOME PROFILE DOKUMEN-SAKIP

SAKIP.SAMPANGKAB.GO.ID



SAMPANG HEBAT BERMARTABAT

BUPATI SAMPANG WAKIL BUPATI SAMPANG
H. SLAMET JUNAIDI H. ABDULLAH HIDAYAT

INFO SAKIP AGENDA PENGUMUMAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

10 May 2018

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa diadakan bahan

ACCOUNTABLE?
RESPONSIBLE?
ANSWERABLE?

GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS (GPR)

ARTIKEL GPR
21 Aug 2019 14:42
Mendorong Paradigma Baru Shelter Adalah Proses Bukan Produk

ARTIKEL GPR
10 Aug 2019 10:51
Kesiapan Bidang Kesehatan Menghadapi Puncak Haji 2019

ARTIKEL GPR

Type here to search

10:03 AM 8/28/2019

Upload Dokumen Sakip

sakip - SAKIP x

Not secure | sakip.sampangkab.go.id/bank-data/

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SAKIP
KABUPATEN SAMPANG
PERINDUSTRIAN

- DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- DINAS KETAHANAN PANGAN
- DINAS PERTANIAN
- DINAS PERIKANAN
- DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
- BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Dokumen
1	cascading bappelitbangda
2	Lampiran Lakip
3	LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
4	MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013
5	Pengantar LKJiP
6	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 P
7	P-PERNYATAAN PK 2017
8	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 1
9	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 2
10	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 3
11	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 4
12	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 5
13	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 6
14	RENSTRA BAPELITBANGDA BAB 7



Yang saya dengar, maka saya lupa

Yang saya lihat, maka saya ingat

Yang saya lakukan, maka saya mengerti & memahami